

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2017**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SURABAYA**

## BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan yang disusun secara periodik. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyajikan Laporan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang merupakan realisasi tahunan dari Renstra PD Tahun 2016 – 2021.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :



1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD). Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu entitas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Surabaya memiliki kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
  - a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
3. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - b. Seksi Ketahanan Keluarga.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
  - a. Seksi Keluarga Berencana;
  - b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
5. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
  - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;



- b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SURABAYA**



Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya didukung oleh personil sebagai berikut:

NO	NAMA BAGIAN / BIDANG	ESELON	STAF
1	Sekretariat	4	13
2	Pemberdayaan Perempuan	3	6
3	Kesejahteraan Keluarga	3	7
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	9
5	Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak	3	6
JUMLAH		16	41
TOTAL PNS		57	

Selain personil PNS dari Pemerintah Kota Surabaya, dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Tenaga Fungsional yang berstatus PNS dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebanyak 60 personil

### 1.3. Permasalahan Utama (strategic issued)

Adapun permasalahan utama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Sentosa yang berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dengan melakukan pengendalian kualitas penduduk melalui keluarga berencana.



2. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan trafficking (perdagangan orang).
3. Masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.
4. Masih banyak kelompok usaha masyarakat hasil fasilitasi inkubasi usaha mandiri yang membutuhkan bantuan dalam melakukan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Belum meratanya kualitas dan kurangnya kuantitas sumber daya pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Sedangkan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II   Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjajian kinerja tahun yang bersangkutan

##### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran:

- A. Matriks Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- D. Lampiran lainnya, penghargaan dll.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap Instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning). Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah, melalui perencanaan strategis diharapkan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

Perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016-2021 disusun dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskan visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu **"Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat"** dengan penjelesaian visi sebagai berikut:

1. Pokok visi "Pemberdayaan" penjelasan visinya adalah Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah Keluarga yang mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya sebagai wahana untuk menghasilkan produk dan jasa yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi, keluarga berdaya akan mengubah sumber daya alam sehingga memiliki nilai tambah. Keluarga berdaya adalah masyarakat yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif. Keluarga berdaya adalah keluarga yang menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat,

kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia.

2. Pokok visi "Keluarga" penjelasan visinya adalah keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pokok visi "Lembaga" penjelasan visinya adalah Dukungan lembaga berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh dari dan untuk masyarakat.

## 2.2. Pernyataan Misi

Dalam Rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga;
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

## 2.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi, maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
2. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
3. Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri



4. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

**Tabel Hubungan antara Misi dan Tujuan**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)
	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks Kepuasan SKPD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program
		Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga	Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah anak

Mengacu kepada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan untuk melaksanakan Misi dan tujuannya yang

didukung oleh program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan
2. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
4. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
6. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

**Tabel Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks Kepuasan SKPD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
	Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
	Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan		
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif



Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah anak	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak

#### 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Surabaya Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang pada akhir tahun digunakan dasar bagi pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi. Artinya pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Capaian Kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 yang akan diukur merupakan indikator tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja tahun 2017 merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	1.80-1.9
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya kualitas layanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	100.00%
2	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	62.00%
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	90,84%
		Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan	76.00%
	<b>Sasaran:</b>		
	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah	100.00%
	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100.00%
3	<b>Tujuan:</b>		
	Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	80.00 %
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10.00%
4	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	0.25%
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25.00%
5	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatkan pemberdayaan	Persentase kecamatan yang responsif gender	48.39%



	perempuan		
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	51.61%
6	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah anak	35.71%
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100.00%

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Artinya pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2017**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,81	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9	1,80-1,9
2	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	43,23%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Kecamatan yang responsive gender	19,35%	35,48%	48,39%	61,29%	74,19%	87,10%	100%
4	Persentase Kelurahan ramah anak	3,25%	19,48%	35,71%	51,95%	66,18%	84,42%	100%

Untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program-program sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Bina Keluarga
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
7. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
8. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
9. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan program pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya serta APBN, daya dukung inilah yang menguatkan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja seluruh program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan alat ukurnya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Laporan Kinerja adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Selain itu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1. Pencapaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2017 untuk setiap tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR)	1.80 – 1.9	1.78	101.11%
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	62.00%	73.86%	119.13%
	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	90.84%	88.89%	97.85%
	Tingkat kepuasan pelayanan keadinasan	76.00%	79.40%	104.47%
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	80.00%	40.27%	50.34%
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	0.25%	0.25%	100.00%
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender	48.39%	48.39%	100.00%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kelurahan Ramah Anak	35.71%	32.47%	90.93%

Tujuan Meningkatnya kualitas layanan KB dasar dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR), besar target 1.80-1.9 dan realisasinya 1.78 (data tahun 2016), data tahun 2017 belum dikeluarkan oleh BKKBN Jawa Timur. Realisasi 1.78 dibandingkan dengan target, maka angka kelahiran total di Kota Surabaya tergolong rendah atau melampaui target yang telah ditentukan, dengan capaian 101,11%.

Tujuan Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, besar target yang harus dicapai adalah 62,00% dan realisasinya didapat melalui survey sebesar 73,86% dengan capaian 119,13% Indikator kinerja lainnya adalah Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program, besar target 90,84% dan realisasinya dengan melihat capaian indikator program dengan nilai lebih dari 76% adalah



88,89% dengan capaian 97,85% Indikator Kinerja terakhir untuk tujuan Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik adalah Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan, besar target yang harus dicapai adalah 76,00% dan realisasinya adalah 79,40 % dengan capaian 104,47%

Tujuan Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri mempunyai indikator kinerja persentase PMKS usia produktif yang omzetnya  $\geq$  1 juta rupiah per bulan, cara mengukur indikator kinerja tujuan ini dengan perhitungan jumlah PMKS usia produktif yang omzetnya  $\geq$  1 juta rupiah per bulan sampai dengan tahun t dibagi jumlah PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi sampai dengan tahun t x 100%. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2017 adalah 80%, maka besar realisasi dengan perhitungan tersebut adalah 40,27% atau dengan capaian 50,34%. beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang sudah ditentukan atau peserta pelatihan tidak melakukan produksi setelah mendapatkan pelatihan adalah:

1. Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik / di toko
2. Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi)
3. Peserta kembali bekerja sebagai guru / bunda PAUD
4. Peserta dilarang oleh suaminya
5. Lebih memilih untuk mengasuh anak / cucu
6. Peserta sakit / hamil
7. Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)

Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif mempunyai indikator kinerja Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif, formulasi pengukuran indikator kinerja jumlah pelaku usaha kreatif tahun (t) - Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) ] / Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) x 100%. Tahun 2017 target kinerja 0,25%, maka besar realisasi dengan perhitungan tersebut adalah 0,25% atau dengan capaian 100,00%.

Tujuan Meningkatkan pemberdayaan perempuan mempunyai indikator kinerja Persentase kecamatan yang responsif gender, formulasi pengukuran indikator kinerja yaitu Jumlah kecamatan yang responsif gender sampai dengan tahun t / jumlah kecamatan x 100%. Target indikator kinerja 48,39%,

maka sampai dengan tahun 2017 kecamatan responsif gender sebanyak 15 kecamatan yaitu:

1. Tandes
2. Rungkut
3. Semampir
4. Jambangan
5. Simokerto
6. Wiyung
7. Benowo
8. Wonokromo
9. Asemrowo
10. Wonocolo
11. Tenggilis Mejoyo
12. Tegalsari
13. Sawahan
14. Tambaksari
15. Pabean Cantian

Capaian kecamatan responsif gender 15 kecamatan dibanding dengan jumlah seluruh kecamatan (31 Kecamatan) maka realisasinya adalah 48,39% atau dengan capaian 100%.

Tujuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak mempunyai indikator kinerja Persentase Kelurahan Ramah Anak, formulasi pengukuran indikator kinerja yaitu Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan tahun t / jumlah Kelurahan x 100%. Target indikator kinerja 35,71%, maka sampai dengan tahun 2017 Kelurahan ramah anak sebanyak 50 Kelurahan yaitu:

1. Jambangan
2. Wonokusumo
3. Kedurus
4. Margorejo
5. Tembok Dukuh
6. Dupak
7. Semolowaru
8. Genteng
9. Siwalankerto
10. Sawunggaling
11. Perak Utara
12. Kandangan
13. Ngagel Rejo
14. Dukuh Setro
15. Pagesangan
16. Manyar Sabrangan
17. Kertajaya
18. Mojo
19. Babat Jerawat
20. Kebraon



21. Sidodadi
22. Mojo
23. Penjaringsari
24. Dukuh Sutorejo
25. Dukuh Kupang
26. Sambikerep
27. Kalisari
28. Karang Poh
29. Asemrowo
30. Lontar
31. Kalijudan
32. Rungkut Menanggal
33. Jepara
34. Waru Gunung
35. Kedung Baruk
36. Menanggal
37. Ngagel
38. Kalirungkut
39. Sidotopo Wetan
40. Keputran
41. Namyu Urip
42. Petemon
43. Putat Jaya
44. Rangkah
45. Gubeng
46. Ketintang
47. Gunung Anyar
48. Tanah Kali Kedinding
49. Alun-Alun Contong
50. Gading

Capaian Kelurahan ramah anak 50 kelurahan dibanding dengan jumlah seluruh kelurahan (154 Kelurahan) maka realisasinya adalah 32,47% atau dengan capaian 90,93%.

### **3.1.2. Pencapaian Kinerja Sasaran**

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2017 untuk setiap sasaran dari masing-masing tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100%	95,86%	95,86%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100%	684,88%	106,34%	95,86%

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan KB dari tujuan Meningkatkan kualitas layanan KB dasar, memiliki indikator kinerja Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap, dengan target 100% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah Akseptor KB Baru Kontrasepsi Mantap : Jumlah Target Akseptor KB Kontrasepsi Mantap ) x 100%. Tahun 2017 realisasi dari target adalah sebesar 95,86% atau dengan capaian 95,86%. Capaian tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015.

Tujuan : 2. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Sasaran : 2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah  
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	93,73%	93,73%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	100,00%	100,00%



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	93,73%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tujuan Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik memiliki 2 sasaran yaitu:

1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah, memiliki indikator kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100% dan formulasi perhitungannya adalah (capaian indikator "persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik")x50% + (capaian indikator "tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran")x50%. Realisasi tahun 2017 adalah 93,73% dengan capaian 93,73%.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program, memiliki indikator kinerja Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan, dengan target kinerja 100% dan formulasi perhitungannya adalah Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operasional plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i) \* 0,6) + (Capaian when pada sub (i) \* 0,4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana. Realisasi tahun 2017 adalah 100,00% dengan capaian 100,00%.

Tujuan : 3. Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri

Sasaran : 4. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	10,00%	100,00%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	0,00%	10,22%	10,00%

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari tujuan Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri, memiliki indikator kinerja Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif, dengan target 10,00% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif : Jumlah PMKS yang telah dibina) x 100%. Maka realisasi dari target pada tahun 2017 adalah sebesar 10,00% atau dengan capaian 100,00%. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan.

Tujuan : 4. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif

Sasaran : 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	25,00%	100,00%



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	0%	0%	100,00%

Sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif, memiliki indikator kinerja Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif, dengan target 25,00% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi) x 100%. Tahun 2017 maka realisasi dari target adalah sebesar 25,00 % atau dengan capaian 100,00%. Hal ini dikarenakan Rumah kreatif merupakan program baru dari Pemerintah Kota Surabaya pada RPJMD 2016-2021, pada tahun 2017 merupakan tahun awal aktifitas di rumah kreatif.

Tujuan : 5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan

Sasaran : 6. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	51,61%	51,61%	100,00%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	51,61%	0,00%	64,52%	51,61%

Sasaran Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dari tujuan Meningkatkan pemberdayaan perempuan, memiliki indikator kinerja Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender, dengan target 51,61% maka formulasi perhitungannya adalah (Jumlah Kecamatan yang Belum Responsif

Gender sampai dengan tahun t : Jumlah Kecamatan) x 100%. Tahun 2017 maka realisasi dari target adalah sebesar 51,61 % atau dengan capaian 100,00%. Capaian tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi tahun 2017 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa tahun 2017 Kecamatan yang Responsif Gender lebih banyak daripada tahun 2016.

Tujuan : 6. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Sasaran : 7. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak

Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sasaran Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari tujuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, memiliki indikator kinerja Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak, dengan target 100% maka formulasi perhitungannya adalah (jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan) x 100%. Tahun 2017 maka realisasi dari target adalah sebesar 100 % atau dengan capaian 100%. Capaian tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2017 sama dengan capaian 2015 dan 2016.

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra

Capaian kinerja Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2017 untuk setiap sasaran apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah sebagai berikut:



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100,00%	95,86%	95,86%
Mengefola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	93,73%	93,73%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	10,00%	100,00%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	25,00%	100,00%
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	0,00%	51,51%	48,39%
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%

Hampir semua target sasaran menggunakan target tahunan, kecuali sasaran Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan menggunakan target yang diakumulasi selama 5 tahun. Realisasi target sasaran terhadap Renstra hampir keseluruhan mencapai target yang di tentukan kecuali target sasaran Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan karena indikator yang digunakan adalah Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender sehingga setiap tahun diharapkan capaian realisasi semakin mengecil dan pada akhir tahun Renstra realisasinya adalah 0,00%.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tidak bisa lepas dari dukungan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2017, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

memperoleh dana dari APBD Kota Surabaya dan APBN baik berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun alokasi keuangan per sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	6.293.028.008	24,81%
2	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	3.893.557.539	15,35%
3	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	259.533.224	1,02%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	7.556.047.907	29,79%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	546.606.426	2,15%
6	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	2.073.448.561	8,17%
7	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	4.745.823.491	18,71%

Pada tahun 2017 semua sasaran memiliki anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator kinerja Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif memiliki anggaran yang kecil, karena sasaran ini dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah dengan Sharing target kinerja.



Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran 1</b>							
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100,00%	95,86%	95,86%	6.293.028.005	5.261.854.546	83,61%
<b>Program 1.1</b>							
Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB baru	81,15%	48,93%	60,30%	5.110.116.038	4.273.181.750	83,62%
	Persentase peserta KB aktif	77,31%	60,96%	104,72%			
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5,80%	2,37%	159,14%			
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20,85%	18,24%	112,62%			
<b>Program 1.2</b>							
Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	47,90%	100,00%	208,77%	1.182.909.968	968.672.796	83,58%
	Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,40%	0,05%	198,53%			
<b>Sasaran 2</b>							
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	93,73%	93,73%	3.893.557.539	3.409.590.258	87,57%
<b>Program 2.1</b>							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72,00%	77,06%	107,03%	3.013.696.424	2.759.585.090	91,57%
<b>Program 2.2</b>							
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%	87,45%	87,45%	879.861.115	650.005.166	73,88%

<b>Sasaran 3</b>							
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan	100,00%	100,00%	100,00%	259.533.224	154.334.849	59,47%
<b>Program 3.1</b>							
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	100,00%	100,00%	259.533.224	154.334.849	59,47%
<b>Sasaran 4</b>							
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	10,00%	100,00%	7.556.047.907	6.111.856.355	80,89%
<b>Program 4.1</b>							
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dan hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75,00%	48,65%	65,13%	7.556.047.907	6.111.856.355	80,89%
<b>Sasaran 5</b>							
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	25,00%	100,00%	546.606.426	381.130.697	69,73%
<b>Program 5.1</b>							
Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/keompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	5,00%	12,79%	255,80%	546.606.426	381.130.697	69,73%
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	43,75%	62,50%	142,86%			
<b>Sasaran 6</b>							
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	51,61%	51,61%	100,00%	2.073.448.581	1.789.591.419	85,35%
<b>Program 6.1</b>							
Program Kesetaraan	Persentase indikator PUG	100,00%	100,00%	100,00%	2.073.448.581	1.789.591.419	85,35%



Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tingkat kecamatan yang terpenuhi							
Sasaran 7								
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	4.745.823.491	4.165.767.216	87,78%	
Program 7.1								
Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	4.745.823.491	4.165.767.216	87,78%	
	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPZA)	65,21%	83,00%	127,28%				
	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	10,00%	63,51%	535,10%				

Hampir secara keseluruhan persentase capaian kinerja sasaran dan program melebihi dari persentase capaian realisasi anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Akan tetapi ada satu Program yang capaian kinerjanya lebih rendah apabila dibanding dengan capaian realisasi anggaran yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi, hal ini dikarenakan adanya peserta pelatihan yang tidak melakukan produksi karena beberapa sebab yaitu:

1. Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik / di toko
2. Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi)
3. Peserta kembali bekerja sebagai guru / bunda PAUD
4. Peserta dilarang oleh suaminya
5. Lebih memilih untuk mengasuh anak / cucu
6. Peserta sakit / hamil
7. Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	95,86%	83,61%	12,25%
2	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	95,73%	87,57%	6,16%
3	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan	100,00%	59,47%	40,53%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	100,00%	80,89%	19,11%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	100,00%	69,73%	30,27%
6	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	100,00%	85,35%	14,65%
7	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	87,78%	12,22%

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengurangi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran, sehingga terlihat hampir semua sasaran menunjukkan hasil yang positif artinya capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran.



## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran hasil pencapaian target Indikator Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2017 sebagai penjabaran dari Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021, sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun anggaran 2017.

Surabaya, 29 Desember 2017

**KEPALA BADAN**



Dra. Nanik Chairani, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630519 198903 2 003

## LAMPIRAN

### MATRIKS RENSTRA

#### DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat

Misi : Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

TUJUAN 1				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1. Persentase kecamatan yang responsif gender	(Jumlah kecamatan yang responsif gender sampai dengan tahun t / jumlah kecamatan) x 100%	48,39%	100,00%

SABARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	(Jumlah Kecamatan yang belum Responsif Gender sampai dengan tahun t : Jumlah Kecamatan) x 100%	64,52%	51,61 %	38,71 %	26,81 %	12,90 %	0,00 %	Peningkatan peran SOP dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

TUJUAN 2:				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase Kelurahan Ramah Anak	(Jumlah Kelurahan Ramah Anak sampai dengan tahun t / jumlah Kelurahan) x 100%	35,71%	100,00%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	(Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : Jumlah		100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	Peningkatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan	Program perlindungan perempuan dan anak



		pemmasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan) x 100%							dan Anak dengan anggaran, sarana dan prasarana	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga

TUJUAN 1				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertilty Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum ASFR_i$ ASFR <sub>i</sub> = angka fertilitas menurut umur	1.80 – 1.9	1.80 – 1.9

SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	(Jumlah Akseptor KB Baru Kontrasepsi Mantap : Jumlah Target Akseptor KB Kontrasepsi Mantap) x 100%		100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	Peningkatan kapasitas SDM dengan dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat	Program Keluarga Berencana Program Bina Keluarga

TUJUAN 2				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Survey	62,00%	70,00%
	2 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 75% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%	90,84%	93,05%
	3 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan	Survey	76,00%	80,00%

SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Mengelola sarana dan prasarana	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana	(capaian indikator persentase		100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kapasitas SDM dalam	Program Pelayanan Administrasi

<p>serta administrasi perkantoran perangkat daerah</p>	<p>prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah</p>	<p>sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik*)x50% + (capaian indikator "tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran")x50%</p>							<p>pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Perkantoran Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan</p>
<p>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program</p>	<p>Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan</p>	<p>Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%)            = (Capaian what pada sub (i) * 0,6) + (Capaian when pada sub (i) * 0,4)            2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub target output sub rencana            3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana</p>		100%	100%	100%	100%	100%	<p>Peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p>



Misi : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

TUJUAN 1				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Memberdayakan 1 PMKS usia produktif untuk mandiri	persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	$(\text{Jumlah PMKS usia produktif yang omzetnya rata-rata} \geq 1 \text{ juta rupiah per bulan sampai dengan tahun } (t) / \text{jumlah PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi sampai dengan tahun } (t)) \times 100\%$	80%	80%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	$(\text{Jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif} : \text{Jumlah PMKS yang telah dibina}) \times 100\%$		10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

TUJUAN 2				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2021
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	1. Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	$[(\text{jumlah pelaku usaha kreatif tahun } (t) - \text{Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun } (t_0)) / \text{Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun } (t_0)] \times 100\%$	0,25%	0,25%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2016	TARGET TAHUN					STRATEGI	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	(Jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi) x 100%		25%	25%	25%	25%	25%	Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. NANIS CHAIRANI, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI RISMAHARINI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Setaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Kami menyepakati untuk mengadakan Perjanjian Kinerja pelaksanaan tugas atas perubahan APBD 2017 yang merupakan perubahan dari perjanjian kinerja atas pelaksanaan APBD TA 2017 guna melaksanakan ketentuan sebagaimana lampiran huruf E dalam PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pihak pertama selama menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersedia dan sanggup untuk :
  - a. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi;
  - b. Melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat;
  - c. Mewujudkan *good governance* dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya peningkatan kinerja institusi.
2. Pihak pertama wajib melaksanakan program dan kegiatan yang telah didefinisikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pihak pertama berjanji melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan detail yang disusun sebagaimana data pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi *e-Project Planning* tertampir yang meliputi :
  - a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai pemakatan pekerjaan dan metode pelaksanaannya;
  - b. Penetapan jadwal mulai serta selesainya pelaksanaan kegiatan per paket pekerjaan;
  - c. Pencapaian kemajuan fisik pekerjaan dan penyerapan keuangan setiap periode waktu sesuai rencana yang ditetapkan.

4. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai indikator kinerja pada lampiran perjanjian ini.
5. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



TRI RISMAHARINI



Dra. NANIS CHAIRANI, MM  
NIP 199305191289032003



**PERJANJIAN KINERJA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN 2017  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender (Bobot Kontribusi: 30 %)	48.39 %
	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	51.61 %
2	<b>Tujuan:</b> Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kelurahan Ramah Anak (Bobot Kontribusi: 30 %)	35.71 %
	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100.00 %
3	<b>Tujuan:</b> Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan (Bobot Kontribusi: 5 %)	80.00 %
	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10.00 %
4	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif (Bobot Kontribusi: 5 %)	0.25 %
	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25.00 %
5	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (Bobot Kontribusi: 5 %)	82.00 %
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan (Bobot Kontribusi: 5 %)	76.00 %
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (Bobot Kontribusi: 5 %)	80.84 %
<b>Sasaran:</b> Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase keasuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan	100.00 %	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100.00 %
	Tujuan: Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Total Fertility Rate (TFR) (Bobot Kontribusi: 15 %)	1.80 - 1.9
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB kontrasepsi Mantap	100.00 %

No	Program	Anggaran
1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 2.073.448.581
2	Program perlindungan perempuan dan anak	Rp 4.745.823.491
3	Program Keluarga Berencana	Rp 5.110.116.038
4	Program Bina Keluarga	Rp 1.182.909.968
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp 7.556.047.907
6	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Rp 546.606.426
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 259.533.224
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3.013.896.424
9	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Rp 879.861.115
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 25.368.043.174</b>

Surabaya,

WALIKOTA,

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,



TRI RISMAHARINI



Drs. NANIS CHAIRANI, MM  
NIP. 196305191989032003



### 3. PENGUKURAN KINERJA

#### ESELON II

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi mantap	100,00%	106,34%	85,88%	95,88%
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Menjaga sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	93,73%	93,73%
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah PMKS yang telah melakukan usaha ekonomi produktif	10,00%	10,22%	10,00%	100,00%
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha di rumah kreatif	25,00%	0%	25,00%	100,00%
Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	51,61%	100,00%	51,61%	100,00%
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2017



Kegiatan Fasilitas Inkubasi Usaha Mandiri





Kegiatan Gebyar / Sarasehan KB tahun 2017



Kegiatan Bakti Sosial KB Tahun 2017



Kegiatan Awarding Kampung Arek Suroboyo Tahun 2017



Kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja Tahun 2017





Kegiatan Surabaya Gender Award Tahun 2017



Kegiatan Seminar Perempuan dan Anak tahun 2017

## Penganugerahan Kota Layak Anak



## Penghargaan anugerah parahita ekapraya (APE)



Prestasi :

- Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya **Kategori Madya** tahun 2008 dan 2009
- Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya **Kategori Utama** tahun 2010
- Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya **Kategori Madya** tahun 2011
- Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya **Kategori Utama** tahun 2012, 2013 dan 2014
- Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya **Kategori Utama Mentor** tahun 2016







**Kota Terbaik I Dalam Pencapaian Jumlah Peserta KB MKJP Tertinggi  
Kategori Kota Tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur**